

SIRKULASI PENGETAHUAN BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN (BGKW) DI BATAVIA DALAM ARSIP SURAT KABAR JAVA GOVERNMENT GAZETTE (1812–1816)

Purwanto Putra^{1*}; Arnila Purnamayanti¹; Eri Maryani¹; Gunawan¹

¹Program Studi D3 Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan

Prof. Dr Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35135

* Korespondensi: purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstract

*This study examines how the Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) contributed to the production and circulation of scientific knowledge in Batavia during the British interregnum, focusing on activity reports published in the Java Government Gazette (1812–1816). Using a qualitative historical design, the research combines heuristic work on newspaper archives with contextual reading of surviving institutional records and scholarly literature on the BGKW. The Gazette is treated as an infrastructure of knowledge: it recorded meetings, lectures, and research communications that linked the society to the colonial state and to transregional scholarly networks. The findings show that after 1812 the Gazette regularized public documentation of BGKW meetings and highlighted a wide disciplinary range including history, botany, geography, and natural history while simultaneously reflecting the political and administrative reconfiguration of information under British rule. The study argues that the BGKW's significance lay not only in research outputs (e.g., papers later issued in *Verhandeligen*) but also in its mediated visibility through the Gazette, which shaped what counted as 'scientific' and who could access it. This perspective also clarifies the genealogy of Indonesia's later knowledge institutions and underscores the relevance of archival management for reconstructing early nineteenth-century intellectual history.*

Keywords: Bataviaasch Genootschap; Java Government Gazette; history of science; knowledge circulation; archival sources; British Java

Abstrak

Studi ini menelaah bagaimana Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) berkontribusi pada produksi dan peredaran pengetahuan ilmiah di Batavia selama masa interregnum Inggris, dengan menganalisis laporan aktivitas BGKW yang dimuat dalam *Java Government Gazette* (1812–1816). Menggunakan desain sejarah kualitatif, penelitian ini melakukan kritik sumber dan pengodean tematik terhadap entri-entri Gazette, serta dilengkapi pembacaan kontekstual atas rekaman BGKW yang masih bertahan dan historiografi yang relevan. Gazette dipahami sebagai infrastruktur pengetahuan yang mencatat secara publik rapat, ceramah, dan komunikasi penelitian, sehingga menghubungkan perkumpulan tersebut dengan administrasi kolonial dan pertukaran keilmuan yang lebih luas. Temuan menunjukkan bahwa pelaporan di Gazette menormalkan dokumentasi publik atas pertemuan-pertemuan BGKW dan menampilkan spektrum disiplin yang luas sejarah, botani, geografi, dan sejarah alam sekaligus merefleksikan rekonfigurasi administratif atas informasi di bawah pemerintahan Inggris. Studi ini berargumen bahwa signifikansi BGKW tidak hanya terletak pada luaran risetnya yang kemudian (misalnya artikel-artikel dalam *Verhandeligen*), tetapi juga pada visibilitas yang dimediasi melalui Gazette, yang turut membentuk kategori “sains” dan pola akses terhadap pengetahuan yang disahkan. Perspektif ini berkontribusi pada genealoginya lembaga-lembaga pengetahuan di Indonesia pada masa berikutnya dan menegaskan bagaimana praktik kearsipan dapat merekonstruksi kehidupan intelektual awal abad ke-19.

Kata kunci: Bataviaasch Genootschap; *Java Government Gazette*; sejarah sains; sirkulasi pengetahuan; arsip surat kabar; Jawa masa Inggris.

PENDAHULUAN

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) didirikan pada 24 April 1778 dengan semboyan *Ten Nutte van het Algemeen* (“untuk kepentingan masyarakat umum”) dan sejak awal diproyeksikan sebagai perkumpulan ilmiah yang mendorong penelitian, pengumpulan

koleksi, serta publikasi pengetahuan. Narasi kelembagaan Museum Nasional Indonesia menautkan eksistensi museum pada pendirian BGKW, termasuk penjelasan bahwa J.C.M. Radermacher menyumbangkan rumah, koleksi benda, dan buku yang kemudian menjadi cikal bakal museum sekaligus perpustakaan ilmiah di Batavia (Niken Prathivi, 2015). Perpustakaan BGKW dari awal pendirian sudah dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis koleksi yang terdiri atas buku, surat kabar, majalah, dan termasuk sumber peta. Setelah Perpustakaan Nasional RI resmi berdiri, koleksi-koleksi tersebut terus dipertahankan dan menjadi koleksi langka yang terdiri dari majalah, surat kabar, buku dan peta (Arliana Wijayanti, 2018). Kelak perpustakaan inilah yang akan menjadi Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI).

Seratus tahun kemudian berdiri perpustakaan khusus di Batavia. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW). Bahwa dalam perkembangannya Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia, 1778) dan perpustakaan yang kemudian menjadi cikal bakal Perpustakaan Nasional RI yang berdiri secara resmi tahun 1980 (Massil, S. W., 1989). Merujuk pada definisi perpustakaan nasional sebagaimana yang didefinisikan oleh UNESCO, dalam konferensi umum ke-16 bertajuk, *“Recommendations Concerning the International Standardization of Library Statistics,”* tahun 1970, memutuskan bahwa definisi perpustakaan nasional ialah: perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkan oleh sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan “deposit,” berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan (Schick, F. L., 1971, hlm. 2–11), (Fuentes-Romero, 2003).

Di Pulau Jawa, jejak paling awal tradisi perpustakaan kerap ditelusuri hingga periode Mataram Kuno. Argumen ini biasanya bertumpu pada munculnya lingkungan kepujangan di istana para pujangga yang menghasilkan dan menyalin karya-karya sastra serta keagamaan. Sejumlah teks yang sering disebut antara lain *Sang Hyang Kamahayanikan*, yang berisi paparan ajaran Buddha Mahayana, disusul rangkuman kisah *Mahabharata* (dalam tradisi *Parwa*) serta epos *Ramayana*. Indikasi lain terlihat pada keberadaan naskah-naskah religius seperti *Brahmandapurana* dan *Agastyaparwa*, yang memperlihatkan berkembangnya produksi, pengelolaan, dan pewarisan pengetahuan berbasis manuskrip pada masa itu (Fransisca Tjandrasih Adj, 2008), (Gonda, J, 1932).

Bahkan dari berbagai sumber ditemukan pada masa Pendudukan Jepang, mulai tahun 1942 sampai 1945 koleksi BGKW boleh dikatakan tetap utuh, padahal pada beberapa perpustakaan lainnya, banyak yang rusak atau dirusak seperti misalnya perpustakaan yang berada di wilayah perkebunan atau berada jauh dari kota yang dimasa pendudukan juga setelahnya (Inotji Hajatullah, Surja Mansjur dan Maksum, 2002). Sebelum peralihan kekuasaan, berbagai koleksi tersebut dilaporkan berada dalam kondisi baik dan terawat (Victor Honig & Frans Verdoron, 1943). Keamanan koleksi Perpustakaan BGKW relatif terjaga karena, menjelang pendudukan Jepang, Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan Batavia sebagai *kota terbuka*. Selain itu, lokasi perpustakaan yang berdekatan dengan

gedung *Rechtshogeschool* yang kemudian digunakan sebagai markas Kempetai (polisi rahasia Jepang) dan dikenal menimbulkan rasa takut ikut menjadi faktor yang memperkuat kontrol kawasan, sehingga koleksi perpustakaan tetap terlindungi.

Bagi historiografi pengetahuan kolonial, BGKW tidak cukup dibaca hanya sebagai “asal-usul institusi”. Ia perlu dipahami sebagai simpul sosial dan material dalam suatu *rezim pengetahuan* (Rammert, 2006) yang mengubah benda, naskah, spesimen alam, dan laporan perjalanan menjadi objek klasifikasi, pembuktian, dan otoritas ilmiah melalui jaringan, medium publikasi, serta tata kelola dokumen. Sejumlah kajian modern menempatkan BGKW sebagai salah satu perkumpulan ilmiah paling awal di Hindia dan titik penting dalam sejarah kelembagaan pengetahuan modern di Indonesia (Groot, 2009).

Pembacaan ini sejalan dengan pendekatan sejarah sains yang menekankan bahwa “ilmu pengetahuan” bukan semata produk individu, melainkan efek sirkulasi, pertukaran, dan negosiasi otoritas di dalam jaringan lintas ruang yang kerap beririsan dengan kepentingan kolonial dan administrasi (Raj, 2007); Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022). Dalam praktik sehari-hari, BGKW berfungsi sebagai “ruang temu” kolonial, mempertemukan pejabat administrasi, dokter, naturalis, rohaniwan, penerjemah, kolektor, dan pengelana melalui rapat, presentasi, korespondensi, kurasi koleksi, serta penerbitan. Apa yang diteliti dan ditulis, karenanya, dipengaruhi oleh pendanaan, fasilitas percetakan, infrastruktur dokumentasi, dan konfigurasi rezim yang berkuasa (Raj, 2007; Stoler, 2009).

Di antara berbagai fase sejarah BGKW, periode transisi 1800–1816 meliputi reorganisasi pasca-VOC, dinamika Bataaf atau Prancis, hingga pendudukan Inggris di Jawa (1811–1816) memiliki signifikansi khusus karena memperlihatkan bagaimana perubahan rezim berdampak pada tata kelola komunikasi resmi dan produksi rekaman tercetak. Narasi kelembagaan menyebut bahwa pada masa Inggris, Thomas Stamford Raffles berperan sebagai direktur perkumpulan dan mendorong penataan ruang karena koleksi di Kalibesar tidak lagi memadai (Museum Nasional Indonesia, n.d.).

Jejak keterhubungan BGKW dengan pusat administrasi juga tampak dalam pengumuman rapat yang meminta kehadiran anggota di *Government House* di Ryswick atau Ryswyk pada jam biasa, bertepatan dengan peringatan hari pendirian perkumpulan (Java Government Gazette, 1813). Menariknya, pengumuman tersebut menampilkan penamaan ganda dalam bahasa Inggris (*Batavian Literary Society*) dan bahasa Belanda (*Bataviaasch Genootschap de Kunsten en Wetenschappen*), yang mengisyaratkan praktik standardisasi administratif sekaligus “penerjemahan institusi” ke dalam bahasa birokrasi baru pada masa Inggris (Java Government Gazette, 1813). Dengan demikian, perubahan kekuasaan tidak hanya memengaruhi agenda penelitian, tetapi juga memengaruhi cara institusi ilmiah diberi bentuk publik yang “terbaca” dan diakui.

Sejauh ini, historiografi mengenai era Inggris (1811–1816) kerap menonjolkan karya-karya besar dan tokoh sentral misalnya *The History of Java* tanpa mengurai secara memadai perangkat dokumentasi dan sirkulasi informasi yang memungkinkan aktivitas ilmiah menjadi pengetahuan publik yang memiliki otoritas (Mulholland, 2019). Padahal, dalam kajian kearsipan, dokumen bukan wadah

pasif, melainkan perangkat pembentuk memori modern, arsip memilih, menata, memberi kategori, dan mengarahkan horizon “yang dapat diketahui” (Schwartz & Cook, 2002). Dalam konteks kolonial, arsip dan administrasi bekerja sekaligus sebagai rekaman dan sebagai bingkai yang memproduksi “kebenaran administratif” (Stoler, 2009; Dirks, 2001). Oleh karena itu, memahami sains kolonial di Batavia menuntut pembacaan terhadap “mesin dokumentasi” yang mengubah rapat menjadi berita, berita menjadi rekaman tercetak, lalu rekaman tercetak menjadi rujukan historis.

Posisi strategis mesin dokumentasi itu tampak pada *Java Government Gazette* (JGG), medium pemerintah berbahasa Inggris yang terbit pada masa administrasi Inggris di Jawa (1812–1816). Sebagai surat kabar pemerintah, JGG memuat pengumuman administrasi, informasi ekonomi, urusan sosial, dan dokumentasi aktivitas institusi; status “resmi” ini membedakannya dari surat kabar komersial karena ia berfungsi sebagai perpanjangan tangan birokrasi dan menghasilkan efek kepatuhan. Dalam pernyataan awal penerbitan, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan, perintah, dan notifikasi yang dimuat harus diperlakukan sebagai informasi resmi dan ditaati pihak terkait (*Java Government Gazette*, 1812). Konsekuensinya, ketika laporan rapat atau presentasi BGKW masuk ke JGG, aktivitas ilmiah tersebut memperoleh bentuk publik yang lebih otoritatif melalui medium negara kolonial bukan semata karena isi rapatnya, tetapi karena cara ia didokumentasikan, diseleksi, dan distandardisasi sebagai “informasi penting”.

Dalam kerangka “publik pengetahuan”, medium resmi semacam ini dapat dipahami sebagai perangkat yang membangun ruang baca kolonial tertentu, ia membatasi audiens, menetapkan gaya pelaporan, dan menyeleksi apa yang layak dimasukkan sebagai urusan publik (Anderson, 2006; Mulholland, 2019). Karena itu, pertanyaan historiografis yang tajam bukan hanya “apa yang diteliti BGKW”, melainkan juga “bagaimana rapat dan presentasi BGKW ditulis ulang menjadi format berita resmi” serta “aktor dan disiplin apa yang ditampilkan sebagai wajah pengetahuan”. Dimensi sirkulasi ini juga terlihat pada pengumuman distribusi keluaran ilmiah pada 1814, sekretaris perkumpulan menyatakan bahwa salinan *Verhandeligen* Jilid VII dapat diambil di percetakan dengan tanda terima, dan tersedia pula untuk publik dengan harga tertentu (*Java Government Gazette*, 1814). Informasi ini memperlihatkan bahwa otoritas pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh produksi naskah, tetapi juga oleh ekosistem distribusi, akses, dan legitimasi yang dimediasi infrastruktur cetak resmi.

Kesenjangan penelitian muncul tepat di sini, yaitu minimnya pembacaan sistematis terhadap JGG sebagai infrastruktur dokumentasi pengetahuan BGKW. Meski sejumlah edisi JGG memuat laporan rapat, undangan pertemuan, serta pengumuman terkait publikasi BGKW, praktik pelaporan tersebut jarang dianalisis sebagai proses *publishing* yang membingkai sains kolonial dan membentuk batas “yang ilmiah” dalam format yang terstandar (Schwartz & Cook, 2002; Stoler, 2009). Akibatnya, historiografi cenderung berhenti pada keluaran ilmiah formal atau narasi tokoh atau karya besar, sementara mekanisme mediasi melalui media resmi pemerintah yang menentukan visibilitas, seleksi, dan bentuk keterbacaan publik belum diperlakukan sebagai arena produksi otoritas ilmiah.

Signifikansi gap ini makin jelas ketika JGG dibandingkan dengan *Bataviasche Koloniale Courant* (BKC), surat kabar era Daendels yang terbit sebelum pendudukan Inggris dan kemudian berhenti sekitar masa peralihan kekuasaan (Monumen Pers Nasional, 2012). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kehadiran atau ketiadaan BGKW dalam kanal dokumentasi resmi bukan hal netral, ia terkait dengan agenda komunikasi pemerintahan, bahasa administrasi (Belanda–Inggris), segmen pembaca yang dibayangkan, dan budaya arsip yang menyertainya. Sejarah merupakan sebuah peristiwa objektif, hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang. Arsip sebagai rekaman peristiwa masa lalu sangat dibutuhkan untuk penulisan sejarah, Putra, P. (2021); Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Dengan demikian, JGG dapat diperlakukan sebagai Sejarah dan jejak konkret perubahan tata kelola informasi pada periode transisi sekaligus pintu masuk untuk membaca hubungan antara sains, media resmi, dan administrasi kolonial (Bastin, 1957; Termorshuizen, 2001).

Bertolak dari pemetaan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada “laporan kegiatan BGKW” dalam JGG (1812–1816), yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai entri-entri tercetak yang memuat (a) undangan atau penjadwalan rapat, (b) ringkasan rapat atau presentasi ilmiah, (c) pengumuman distribusi atau penerbitan keluaran BGKW, dan (d) informasi kelembagaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ilmiah dan publikasinya. Fokus ini digunakan untuk memeriksa bagaimana pengetahuan ilmiah diberi bentuk publik dan legitimasi melalui medium resmi.

Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama pertama, bagaimana format pelaporan kegiatan BGKW dalam *Java Government Gazette* (JGG) disusun, mencakup struktur informasi yang ditampilkan serta pola standardisasi yang muncul dari waktu ke waktu; kedua, jenis kegiatan, spektrum disiplin, dan aktor apa yang paling menonjol dalam pelaporan JGG, serta apa implikasinya bagi cara periode tersebut mendefinisikan sesuatu sebagai “ilmiah”; dan ketiga, bagaimana konteks politik-administratif pada masa pemerintahan Inggris memengaruhi praktik dokumentasi serta sirkulasi pengetahuan BGKW, termasuk melalui perbandingan terbatas dengan kanal resmi sebelumnya seperti *Bataviaasche Koloniale Courant* (BKC).

Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi dan sekaligus menegaskan kebaruannya. Pertama, penelitian ini menyajikan pemetaan empiris atas bentuk dan isi pelaporan BGKW dalam JGG sebagai korpus surat kabar pemerintah pada periode Inggris. Kedua, penelitian ini memperluas historiografi BGKW dari fokus pada “karya besar” menuju analisis mekanisme dokumentasi yang membuat aktivitas ilmiah tampil sebagai pengetahuan publik yang sah. Ketiga, dari perspektif kearsipan, penelitian ini menegaskan pentingnya membaca hubungan *provenance* antara arsip kelembagaan dan arsip pers untuk memahami *evidential value*, bias seleksi, serta legitimasi informasi pada masa kolonial (Schwartz & Cook, 2002; Stoler, 2009; Putra, P. 2019). Kebaruan penelitian ini, dengan demikian, terletak pada pembacaan JGG bukan sebagai “wadah berita” semata, melainkan sebagai mesin dokumentasi dan legitimasi pengetahuan yang membentuk apa yang dicatat, siapa yang ditampilkan, dan bagaimana pengetahuan memperoleh otoritas.

Struktur naskah disusun sebagai berikut. Bagian kedua menguraikan tinjauan pustaka dan kerangka teoretik tentang sirkulasi pengetahuan, media resmi sebagai infrastruktur dokumentasi, serta perspektif kearsipan kritis. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian, korpus data JGG, dan strategi analisis. Bagian keempat menyajikan hasil pemetaan bentuk pelaporan, disiplin, dan aktor, serta membahasnya dalam konteks administrasi Inggris. Bagian kelima menyimpulkan temuan, kontribusi, keterbatasan, dan agenda riset lanjutan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain historis untuk merekonstruksi praktik dokumentasi dan sirkulasi pengetahuan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) pada masa transisi kekuasaan kolonial awal abad ke-19. Desain historis dipilih karena penelitian bertumpu pada sumber-sumber sezaman yang perlu dibaca melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan historiografi, sehingga relasi antara peristiwa, teks, dan konteks administratif dapat ditafsirkan secara bertanggung jawab (Groot, 2009; Putra, 2024).

Untuk membaca surat kabar resmi bukan hanya sebagai “cermin fakta”, penelitian ini mengintegrasikan analisis wacana kritis pada level teks–praktik publikasi–konteks kekuasaan. Integrasi ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pilihan informasi, gaya penulisan, dan bahasa administratif membentuk otoritas pengetahuan kolonial serta memengaruhi visibilitas aktor dan disiplin ilmu yang ditampilkan (Mulholland, 2019; Muryani, 2010). Dengan demikian, penelitian menggabungkan logika historiografi (rekonstruksi berbasis sumber) dan logika analisis wacana (pembacaan terhadap fungsi komunikasi dan bias institusional medium).

Sumber primer utama ialah arsip Java Government Gazette (JGG) periode 1812–1816, khususnya bagian yang memuat (a) undangan atau penjadwalan rapat, (b) ringkasan rapat atau pembacaan makalah atau pidato, (c) pengumuman kelembagaan, dan (d) komunikasi ilmiah yang merujuk BGKW. Dalam penelitian ini, JGG diperlakukan sebagai media resmi pemerintahan Inggris sehingga setiap entri dipahami sebagai artefak administratif yang memiliki audiens sasaran, kepentingan birokrasi, dan logika publikasi tertentu, bukan sekadar informasi faktual.

Untuk memperkuat pembacaan lintas-medium, penelitian menggunakan terbitan *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* pada awal abad ke-19 sebagai pembanding antara “publikasi internal” perkumpulan dan “publikasi resmi” melalui surat kabar pemerintah. Dokumen sezaman lain (misalnya laporan kegiatan, inventaris, atau dokumen administratif terkait koleksi atau aktivitas) dimanfaatkan untuk menelusuri kesinambungan kelembagaan serta memeriksa konsistensi antara aktivitas yang dipublikasikan dan jejak administratif yang masih tersisa. Literatur sekunder digunakan untuk menempatkan temuan dalam konteks historiografi pengetahuan kolonial, sejarah pers kolonial, serta dinamika institusi pengetahuan atau memori agar interpretasi tidak terlepas dari perubahan politik dan infrastruktur informasi awal abad 19.

Penelitian bersifat multilokasi berbasis arsip, memanfaatkan koleksi digital maupun fisik dari lembaga penyimpanan dokumen. Akses dilakukan melalui repositori nasional (misalnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk penelusuran edisi JGG dan publikasi langka pendukung, serta Arsip Nasional Republik Indonesia untuk dokumen administratif yang dapat memverifikasi konteks pelaporan), (Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. 2023). Untuk memperluas jangkauan dan mengatasi keterbatasan akses fisik, penelitian juga memanfaatkan koleksi digital (misalnya Leiden University Libraries dan pangkalan data Delpher atau KB) sebagai rute penelusuran berbasis pencarian teks penuh, sehingga pelacakan kemunculan BGKW dapat dilakukan lebih efisien dan dapat diuji ulang (Groot, 2009; Supratman, 2024). Strategi multilokasi memungkinkan perbandingan varian salinan, pemeriksaan kelengkapan nomor, serta verifikasi fragmen yang rusak atau kurang terbaca pada satu salinan dengan salinan lain.

Penelitian ini tidak menggunakan responden dalam pengertian statistik, melainkan melakukan seleksi sumber secara purposif dan berlapis untuk memastikan data yang dianalisis benar-benar relevan dengan fokus kajian. Unit analisis penelitian adalah entri atau fragmen pemberitaan dalam Java Government Gazette (JGG), misalnya notice, announcement, ringkasan rapat, laporan presentasi, atau pengumuman distribusi publikasi, yang muncul pada satu halaman atau rubrik tertentu.

Kriteria inklusi mencakup seluruh entri yang menyebut BGKW secara eksplisit, atau merujuk pada aktivitasnya melalui variasi penamaan lembaga seperti Bataviaasch Genootschap, Batavian Literary Society, serta variasi ejaan lain, sekaligus melalui istilah aktivitas seperti meeting, proceedings, lecture atau paper, anniversary, secretary notice, serta distribution of volumes. Kriteria eksklusi diterapkan pada entri yang menggunakan istilah serupa namun tidak merujuk pada BGKW atau tidak terkait aktivitas ilmiah maupun kelembagaan, misalnya penyebutan “society” yang mengacu pada perkumpulan lain atau konteks non-ilmiah.

Untuk mengurangi bias akibat variasi ejaan dan keterbatasan digitalisasi atau OCR, setiap temuan hasil pencarian kata kunci dikonfirmasi melalui pembacaan konteks halaman, mencakup rubrik, paragraf pendahulu, dan catatan editorial, agar entri tidak terlepas dari konteks publikasinya. Selain itu, seleksi mengikuti prinsip kelengkapan dengan memeriksa sinonim, singkatan, dan variasi penyebutan yang lazim pada surat kabar masa itu. Langkah ini penting agar pemetaan aktivitas BGKW tidak bias oleh kebetulan kosakata atau kualitas pemindaian yang tidak merata.

Pada tahap pengumpulan data dan manajemen data, penelusuran dilakukan secara sistematis atau heuristik terhadap korpus JGG dan sumber penunjang, lalu diikuti dokumentasi bibliografis serta pencatatan metadata untuk setiap entri yang dinilai relevan. Setiap entri yang memenuhi kriteria inklusi dicatat informasi dasarnya, meliputi tanggal edisi, nomor halaman, rubrik atau jenis item seperti notice, report, atau announcement, judul jika tersedia, penanda kata kunci atau penamaan BGKW, serta kutipan ringkas bagian yang memuat rujukan kepada BGKW.

Seluruh catatan kemudian dikompilasi dalam bank data penelitian untuk mendukung audit trail sehingga peneliti dapat menelusuri ulang sumber ketika terjadi ketidakkonsistenan temuan atau

ketika pembaca menuntut verifikasi. File digital atau hasil pemindaian disimpan dengan penamaan seragam berbasis tanggal dan nomor halaman agar pemeriksaan ulang dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur. Praktik ini menuntut pemisahan yang tegas antara data mentah, catatan analitis, dan simpulan interpretatif agar jalur argumentasi dapat dinilai transparan (Putra, 2024; Sebina, 2006).

Prosedur analisis data mengikuti tahapan historis klasik yang diperkaya dengan analisis isi serta analisis wacana kritis. Pada tahap kritik sumber, JGG diperlakukan sebagai produk media resmi pemerintahan Inggris yang membawa kepentingan birokrasi. Karena itu, setiap entri terkait BGKW dibaca untuk menilai alasan pemuatan, bentuk ringkasan atau penyederhanaan informasi, penonjolan aktor atau agenda tertentu, serta legitimasi yang dihasilkan oleh gaya penulisan administratif (Mulholland, 2019; Muryani, 2010).

Tahap berikutnya adalah pengodean tematik secara manual terhadap entri yang relevan. Pengodean mencakup kategori jenis kegiatan seperti rapat bulanan, peringatan pendirian, pembacaan makalah atau pidato, serta pengumuman distribusi publikasi; kategori aktor dan posisi seperti sekretaris, anggota, pejabat pemerintah, serta ilmuwan atau praktisi; kategori bidang pengetahuan seperti sejarah, botani, geografi, serta sejarah alam; kategori relasi kelembagaan antara BGKW dan pemerintah seperti lokasi pertemuan, bentuk otorisasi, dukungan administrasi, serta kanal percetakan; dan kategori ciri wacana administratif seperti formula pemberitahuan, bentuk perintah atau imbauan, dan penanda resmi.

Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan lintas media dengan membandingkan hasil pengodean JGG dengan *Verhandeligen* dan dokumen penunjang lain untuk menilai apakah wacana resmi JGG selaras, berbeda, atau justru menyempitkan kompleksitas aktivitas ilmiah yang terekam dalam publikasi internal perkumpulan. Langkah ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan berubah ketika berpindah medium dari ranah perkumpulan ke ranah negara, sekaligus bagaimana otoritas ilmiah dinegosiasikan melalui bentuk publikasi yang berbeda (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1809; Groot, 2009).

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, pemeriksaan sejawat, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan entri JGG dengan *Verhandeligen*, dokumen administratif sezaman, serta literatur historiografi yang relevan agar interpretasi tidak bertumpu pada satu kanal dokumentasi. Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui pengecekan konsistensi pengodean secara internal dan konsultasi terbatas dengan pakar sejarah kolonial atau peneliti BGKW untuk menilai kewajaran interpretasi serta ketepatan konteks istilah dan peristiwa. Sementara itu, audit trail dijaga dengan menyimpan jejak keputusan analitis, perubahan kategori, dan alasan inklusi serta eksklusi data sehingga proses penelitian dapat direplikasi secara prosedural meskipun objek arsip memiliki keterbatasan material (Sebina, 2006; Purwanto Putra, 2021; Purwanto Putra et al., 2021).

Dengan desain tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan pembacaan yang tidak hanya memetakan aktivitas BGKW, tetapi juga menjelaskan bagaimana JGG bekerja sebagai infrastruktur

dokumentasi yang membentuk visibilitas dan otoritas pengetahuan kolonial pada periode 1812 hingga 1816.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BGKW pada Masa Transisi 1795–1811

Sumber-sumber sezaman dan pembacaan historiografis menunjukkan bahwa menjelang pergantian abad ke-19, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) mengalami stagnasi yang nyata. Kritik Dirk van Hogendorp bahwa Batavia “pernah” memiliki perkumpulan seni dan ilmu pengetahuan dan “masih ada dalam nama” sering dibaca sebagai indikator melemahnya energi kelembagaan pada penghujung VOC, sekaligus menyingkap jarak antara ideal Pencerahan dan praktik kekuasaan kolonial yang ditopang hierarki status, patronase, dan agenda administratif harian (Van Hogendorp, 1799, sebagaimana dikutip dalam Groot, 2009). Dalam konteks ini, stagnasi bukan sekadar “kurang kegiatan,” melainkan gejala rapuhnya ekologi pengetahuan, penelitian bergantung pada individu, publikasi bergantung pada logistik dan percetakan, sementara legitimasi ilmiah bergantung pada jaringan elite yang mudah terganggu oleh krisis politik dan perang (Groot, 2009).

Perubahan politik 1795 dan reorganisasi di bawah atmosfer Bataaf membuka ruang bagi reformasi internal BGKW, terutama sekitar tahun 1800. Reformasi ini mencakup pengurangan simbol status, penataan ulang dewan, dan pergeseran kriteria keanggotaan menuju “kualitas” yang lebih menekankan kompetensi ketimbang pangkat (Groot, 2009). Namun pembaruan ini tidak otomatis menghasilkan intensifikasi kegiatan karena institusi pengetahuan tetap bekerja di bawah batasan komunikasi yang lamban, ketidakstabilan keamanan, serta ketergantungan pada infrastruktur administrasi kolonial yang sedang bergejolak. BGKW berupaya menciptakan hubungan baik dengan penguasa agar eksistensi organisasi terjamin.

Kesulitan rekonstruksi aktivitas BGKW pada 1802–1811 terutama disebabkan oleh problem kearsipan dan hilangnya sebagian catatan resolusi, sehingga jejak rapat dan keputusan organisasi tidak selalu dapat diikuti secara kontinu (Groot, 2009; Putra, 2024). Secara metodologis, “kekosongan arsip” di sini diperlakukan sebagai kondisi struktural yang membentuk apa yang dapat diketahui bukan sekadar ketiadaan data. Akibatnya, historiografi mudah tergelincir ke narasi tokoh besar atau karya monumental, sementara ritme kelembagaan sehari-hari luput dari perhatian (Putra, 2024).

Meski demikian, indikasi kesinambungan kelembagaan tetap dapat dibaca melalui sumber-sumber tidak langsung, seperti daftar anggota yang diperbarui hingga 1815 dan informasi pertemuan yang berlangsung sporadis. Data semacam itu menunjukkan bahwa BGKW tidak “mati,” melainkan bertahan dalam bentuk minimal, mengandalkan figur tertentu sebagai simpul administratif yang menjaga rutinitas dasar (Groot, 2009). Temuan ini penting sebagai latar: sebelum 1811, problem BGKW bukan hanya “kekurangan ilmuwan,” melainkan keterbatasan perangkat institusional untuk

mengubah data, korespondensi, dan presentasi menjadi rekaman tercetak yang stabil sebuah prasyarat bagi visibilitas pengetahuan.

2. Java Government Gazette 1812–1816: Korpus, Pola Pelaporan, dan Standardisasi Visibilitas BGKW

Kedatangan Inggris pada 1811 mengubah ekologi informasi di Batavia dengan memperkuat fungsi media resmi sebagai kanal administrasi sekaligus ruang sirkulasi pengetahuan. *Java Government Gazette* (JGG), yang terbit pada 1812–1816, beroperasi sebagai surat kabar resmi pemerintahan Inggris di Jawa dan menjadi medium untuk mengumumkan kebijakan, urusan ekonomi, informasi administratif, serta berita yang relevan bagi komunitas pembaca kolonial (Anonim, 1812; Supratman, 2024). Dalam konteks BGKW, JGG tidak hanya “mencatat”, tetapi menghasilkan bentuk publik, ia menentukan aktivitas apa yang tampil, bagaimana diringkas, dan bagaimana legitimasi itu didistribusikan.

Berdasarkan penelusuran korpus JGG periode 1812–1816, entri yang terkait BGKW dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe utama, yaitu (1) pengumuman rapat atau agenda, (2) ringkasan rapat atau presentasi ilmiah, (3) pengumuman kelembagaan (misalnya sekretaris, keanggotaan, lokasi), dan (4) pengumuman distribusi publikasi. Secara empiris, pola ini menunjukkan eksternalisasi rekaman kelembagaan, jejak aktivitas yang sebelumnya rapuh (bergantung pada arsip internal) mulai “dipindahkan” ke medium berkala yang didistribusikan, sehingga secara material lebih mudah dilacak ulang (Groot, 2009; Supratman, 2024).

Dua temuan penting muncul dari pembacaan tekstual atas entri-entri tersebut. Pertama, JGG menampilkan rutinisasi administratif atas aktivitas ilmiah BGKW, rapat dan agenda dipublikasikan dalam format pengumuman yang seragam dan berulang. Kedua, terjadi standardisasi identitas kelembagaan melalui variasi penamaan yang hidup berdampingan. Misalnya, pengumuman rapat untuk peringatan hari pendirian memperlihatkan penamaan BGKW dalam bahasa Inggris (*Batavian Literary Society*) dan bahasa Belanda (*Bataviaasch Genootschap de Kunsten en Wetenschappen*), sekaligus menunjukkan keterhubungan tempat pertemuan dengan ruang pemerintahan (Government House di Ryswick atau Ryswyk) (Java Government Gazette, 1 April 1813). Pola ini memperkuat argumen bahwa media resmi tidak netral, ia mengikat aktivitas ilmiah pada bahasa administrasi dan ruang legitimasi negara.

Selain rapat, JGG juga memuat indikasi ekosistem distribusi pengetahuan. Pengumuman mengenai pembagian atau penjualan *Verhandeligen* (Jilid VII) di percetakan menunjukkan bahwa keluaran ilmiah BGKW bergerak melalui mekanisme administratif yang terukur (tanda terima, lokasi pengambilan, harga) (Java Government Gazette, 19 Oktober 1814). Temuan ini krusial, “sirkulasi pengetahuan” tidak hanya ditentukan oleh produksi makalah, tetapi oleh infrastruktur cetak dan tata kelola distribusi yang disahkan medium resmi.

Laporan-laporan JGG memperlihatkan spektrum disiplin yang luas, mencakup sejarah atau filologi, botani atau obat-obatan, geografi atau deskripsi wilayah, hingga sejarah alam. Keragaman ini konsisten dengan karakter BGKW sebagai simpul pengetahuan kolonial yang menghubungkan kerja ilmiah lapangan dengan kebutuhan administrasi. Pengetahuan tentang flora, fauna, kesehatan, dan pemetaan wilayah bernilai praktis bagi pemerintahan kolonial, sehingga wajar jika tema-tema tersebut memperoleh ruang karena beririsan dengan kepentingan pertanian, kesehatan publik, dan pengelolaan sumber daya (Groot, 2009; Marsden, 1815).

Keragaman disiplin tidak otomatis berarti keragaman sudut pandang. Ringkasan JGG mengindikasikan proses kurasi, apa yang dilaporkan, siapa yang disebut, dan bagaimana topik dibingkai menunjukkan hierarki kepentingan yang cenderung selaras dengan prioritas administrasi dan audiens pembaca Eropa. Media resmi cenderung menyukai informasi yang “berguna”, mudah dipadatkan, dan dapat ditempatkan dalam narasi kemajuan administratif (Muryani, 2010). Karena itu, analisis tidak berhenti pada daftar topik, melainkan menilai strategi representasi, yaitu (a) aktor mana yang paling sering tampil, (b) disiplin mana yang sering diberi porsi ringkas, (c) bentuk bahasa apa yang mengesankan otoritas (mis. formula pengumuman, rujukan jabatan, dan penanda resmi).

3. Politik Informasi, Kekosongan Arsip, dan Warisan Kelembagaan

Perbandingan dengan *Verhandeligen* menjadi krusial untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan berubah ketika berpindah medium. Publikasi internal BGKW umumnya menyajikan argumen lebih panjang dengan detail observasi, rujukan, dan struktur penulisan ilmiah, sementara JGG mengubahnya menjadi format berita atau pengumuman ringkas, informatif, dan berorientasi administrasi. Transformasi medium ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya “diproduksi” di lapangan atau di ruang rapat, tetapi juga “dibentuk ulang” ketika masuk ke logika media resmi (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1809; Groot, 2009).

Relasi BGKW–JGG memperlihatkan bahwa politik kekuasaan dan politik informasi bekerja beriringan. Ketika negara kolonial menyediakan kanal publikasi, fasilitas percetakan, dan legitimasi simbolik, institusi ilmiah diuntungkan karena aktivitasnya menjadi terlihat dan lebih mudah terdokumentasi. Namun dukungan itu juga berpotensi membatasi otonomi, prioritas administrasi dapat mempengaruhi apa yang dianggap layak dipublikasikan dan bagaimana pengetahuan diposisikan sebagai bagian dari proyek pemerintahan (Groot, 2009; Raffles, 1817). Ketergantungan pada infrastruktur negara juga membuat dokumentasi rentan terhadap perubahan rezim, sebagaimana terlihat dalam transisi 1795–1816 yang memproduksi banyak “putus-sambung” jejak.

Dari sudut kearsipan, temuan ini menguatkan nilai JGG sebagai sumber primer untuk menutup “kekosongan arsip” ketika catatan internal BGKW hilang atau tidak lengkap. Surat kabar resmi dapat berfungsi sebagai indeks aktivitas, kronologi rapat, dan petunjuk aktor yang terlibat, meskipun tidak menyimpan detail substantif setingkat notulen atau naskah ilmiah lengkap (Supratman, 2024; Putra, 2024). Karena itu, kerja historiografis pada periode transisi memerlukan strategi “membaca silang”

antara arsip internal, publikasi ilmiah, dan media resmi untuk merekonstruksi dinamika institusional secara lebih utuh.

Implikasi kontemporeranya relevan bagi lembaga memori Indonesia yang mengelola warisan kolonial yang terfragmentasi. Misalnya, setelah itu koleksi Perpustakaan BGKW beralih menjadi koleksi Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Ketika BGKW ini berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, aturan atau ketentuan tahun 1913 juga tidak berlaku lagi, yang imbasnya terjadi kekosongan fungsi pengawasan bibliografi antara 1942 sampai 1952. Pendokumentasian data bibliografis terbitan ketika itu, khususnya antara tahun 1945 sampai 1952, terkumpul dalam karya Ockeloen yaitu, “Catalogus dari buku-buku yang diterbitkan di Indonesia”(Ockeloen, G., 1950). Karya Ockeloen ini menjadi semacam alternatif (karena tidak didukung oleh undang-undang deposit) yang mendokumentasikan fungsi pengawasan bibliografi, melalui karya seperti *Catalogus van Boeken en Tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937* [with] *Catalogus dari Boekoe-boekoe dan Madjallah-madjallah yang diterbitkan di Hindia Belanda dari tahun 1870-1937* (Ockeloen, G., 1939). Majalah yang diberi judul, *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunten en Wetenschap* (Spat, C., 1927).

Lalu secara praktis, surat kabar resmi seperti JGG menabuh khazanah koleksi dan dapat digunakan sebagai pintu masuk deskripsi koleksi untuk menghubungkan nama aktor, topik rapat, dan lokasi kegiatan dengan artefak, naskah, atau seri arsip yang tersebar. Dengan demikian, pengelolaan arsip tidak hanya menyangkut penyimpanan, tetapi juga tata kelola temu kembali, konteks evidensial, dan akuntabilitas pengetahuan (Sebina, 2006; Purwanto Putra et al., 2021).

Dengan demikian, pembahasan BGKW pada masa transisi tidak cukup berhenti pada narasi “kebangkitan” pasca-1811. Yang lebih menentukan ialah mekanisme yang membuat aktivitas ilmiah menjadi terlihat, terdokumentasi, dan diakui sebagai pengetahuan publik. Di titik inilah JGG penting, ia menunjukkan bahwa sejarah sains kolonial bukan hanya sejarah ide dan tokoh, melainkan juga sejarah medium, birokrasi, dan praktik dokumentasi yang membentuk horizon apa yang dapat diketahui tentang Batavia pada awal abad ke-19 (Muryani, 2010; Supratman, 2024).

KESIMPULAN

Bataviaasch Genootschap memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Batavia pada awal abad ke-19. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pendanaan, dan ketidaksetaraan akses ilmu pengetahuan, perkumpulan ini berhasil memperkenalkan ilmu pengetahuan Eropa kepada masyarakat kolonial serta memainkan peran penting dalam membentuk struktur ilmiah di Batavia. Upaya mereka mencakup pengumpulan koleksi artefak, penelitian lapangan, dan publikasi karya ilmiah yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya.

Periode 1802–1820 dalam sejarah Bataviaasch Genootschap merupakan masa transisi yang penuh tantangan sekaligus peluang. Pergantian anggota dewan, hilangnya sebagian arsip resmi, dan

minimnya komunikasi dengan anggota luar Batavia membuat rekonstruksi sejarah periode ini sulit dilakukan. Meskipun terdapat catatan yang saling bertentangan seperti antara Van Hoeffell dan Reinwardt data yang ada menunjukkan bahwa kegiatan perkumpulan tidak sepenuhnya terhenti, meski frekuensinya menurun drastis sebelum 1811.

Peran tokoh-tokoh seperti Thomas Horsfield, C.G.C. Reinwardt, dan Leschenault de la Tour membuktikan bahwa penelitian ilmiah tetap berlangsung, walaupun publikasi sering tertunda akibat perang, keterbatasan fasilitas, dan lambatnya komunikasi. Di tengah keterbatasan tersebut, hasil penelitian tetap memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan botani, zoologi, dan etnografi di wilayah Nusantara.

Kedatangan Inggris di bawah kepemimpinan Raffles menjadi titik kebangkitan kembali Bataviaasch Genootschap. Raffles membawa energi baru, memperluas keanggotaan, menghidupkan kembali pertemuan rutin, mendukung publikasi ilmiah, serta mempererat hubungan antara perkumpulan dan pemerintah kolonial. Dukungan ini tidak hanya memulihkan aktivitas perkumpulan, tetapi juga menghubungkannya dengan jaringan ilmiah internasional, sehingga hasil penelitian dari Batavia dapat dikenal di Eropa.

Secara keseluruhan, periode ini menandai pergeseran Bataviaasch Genootschap dari organisasi yang sempat stagnan menuju institusi yang lebih aktif, modern, dan terhubung dengan komunitas ilmiah global. Meskipun keberhasilan tersebut sebagian besar ditopang oleh dukungan pemerintah kolonial, Bataviaasch Genootschap berhasil meletakkan fondasi kelembagaan dan budaya penelitian yang berkelanjutan. Warisan dari masa ini menjadi pijakan penting bagi perkembangan lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia pada abad-abad berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, F. T. (2008). Konsep religi dan nilai historis dalam *Kakawin Brahmanda Purana*. *Sintesis*, 6(2).
- Al-Faqih, M. Z. (n.d.). *Politik hukum pers pada masa kolonial* [PDF]. Neliti.
- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Bastin, J. (1957). *The native policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra: An economic interpretation*. Clarendon Press.
- Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (1809). *Laporan kegiatan ilmiah*. Batavia.
- Dirks, N. B. (2001). *Castes of mind: Colonialism and the making of modern India*. Princeton University Press.
- Fuentes-Romero, J. J. (2003). The concept of a national library in less developed countries, with special reference to Africa. *Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues*, 15(1), 23–35. <https://doi.org/10.1177/095574900301500104>
- Gonda, J. (1932). *Het Oud-Javaansche Brahmanda Purana: Prozatekst en kakawin*. B.J.

- Groot, H. (2006). *Van de Groote Rivier naar het Koningsplein: Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778–1867* (Disertasi). Leiden Universiteit.
- Groot, H. (2009). *Van Batavia naar Weltevreden: Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778–1867*. KITLV.
- Hajatullah, I., Mansjur, S., & Maksum. (2002). *160th anniversary of Bibliotheca Bogoriensis*. Indonesian Center for Agricultural Library and Technology Dissemination.
- Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022). *Integrasi manajemen pengetahuan dan literasi informasi: Pendekatan konsep dan praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Honig, V., & Verdoron, F. (Eds.). (1943). *Science and scientists in Netherlands Indies*. Board of the Netherlands Indies, Surinam and Curacao.
- Java Government Gazette*. (1812–1816). [Newspaper]. Batavia.
- Marsden, J. (1815). *History of Batavia under British rule*. Longman.
- Massil, S. W. (1989). The history of the National Library of Indonesia: The bibliographical Borobudur. *Libraries & Culture*, 24(4), 475–488.
- Monumen Pers Nasional. (2012, July 19). *Penerbitan pers di masa penjajahan dan awal kemerdekaan Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- Museum Nasional Indonesia. (n.d.). *Tentang kami*. Museum Nasional Indonesia.
- Mulholland, J. (2019). Outpost aesthetics: The literary culture of British-occupied Java, 1811–1816. *Postcolonial Text*, 14(3–4).
- Muryani, N. (2010). Peran surat kabar dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kolonial. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 24(2), 120–135.
- Ockeloen, G. (1939). *Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870–1937* [with] *Catalogus dari boekoe-boekoe dan madjallah-madjallah jang diterbitkan di Hindia Belanda dari tahoen 1870–1937*. Kolff.
- Ockeloen, G. (1950). *Catalogus dari buku-buku jang diterbitkan di Indonesia*. Kolff.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1989). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2023, September 12). *Perpusnas gelar FGD penguatan kelembagaan*. Perpusnas RI.
- Putra, P. (2019). Praktik informasi sebagai upaya propaganda program kolonisasi pada masa Hindia Belanda. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v4i1.923>
- Putra, P. (2021a). Prinsip demokratisasi arsip: Suatu konsep untuk menjembatani antara kearsipan, penulisan sejarah, dan pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 39–56. <https://doi.org/10.22146/khazanah.56741>
- Putra, P. (2021b). Propaganda “Kolonisatie” of the Dutch colonial government: The migration program for the population out of Java in the early 20th century. In *Proceedings of the 2nd*

International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 606, pp. 113–117). Atlantis Press.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.016>

- Putra, P. (2022). Menjemput arsip hingga ke Belanda: Dari praktik manajemen arsip hingga akreditasi kearsipan PT Semen Padang. *Al-Ma'arif: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.37108/almaarif.v2i1.815>
- Putra, P. (2024). Dari pendirian hingga fase awal kemunduran: Bibliotheek dan inventaris arsip-arsip Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778–1820. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1, 351–360.
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2021). Efisiensi penyimpanan dan aksesibilitas arsip vital dalam penyelenggaraan kearsipan universitas di UPT Kearsipan Unila. *Jurnal JODIS*, 2(1).
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023a). “Archivum Est Potentia” UPT Archives Lampung University: Implementation of archives as a source of information and collective memory, Lampung University. In R. Perdana, G. E. Putrawan, B. Saputra, & T. Y. Septiawan (Eds.), *Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022) (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 740, pp. 5–16). Atlantis Press.* https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_26
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023b). Memahami lebih dalam tentang teori siklus hidup, model kontinum rekod dan konsep arsip total untuk implementasi di institusi dan organisasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*, 25(2), Article 3. <https://doi.org/10.7454/JIPK.v25i2.1091>
- Raffles, T. (1817). *The history of Java*. R. Philips.
- Raj, K. (2007). *Relocating modern science: Circulation and the construction of knowledge in South Asia and Europe, 1650–1900*. Palgrave Macmillan.
- Rammert, W. (2006). Two styles of knowing and knowledge regimes: Between “explicitation” and “exploration” under conditions of “functional specialization” or “fragmental distribution”. In J. Hage & M. T. H. Meeus (Eds.), *Innovation, science, and institutional change: A research handbook*. Oxford University Press.
- Schick, F. L. (1971). The international standardization of library statistics. *UNESCO Bulletin for Libraries*, 25(1), 2–11.
- Schwartz, J. M., & Cook, T. (2002). Archives, records, and power: The making of modern memory. *Archival Science*, 2, 1–19.
- Sebina, P. M. I. M. (2006). Freedom of information, records management and good governance: Any symbolic relationship? *ESARBICA Journal: Journal of the Eastern and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives*, 23(1), 45–50. <https://doi.org/10.4314/esarjo.v23i1.30963>

- Spat, C. (1927). *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*. Nijhoff.
- Stoler, A. L. (2009). *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense*. Princeton University Press.
- Supratman, F. R. (2024). Java Government Gazette: Koleksi surat kabar berbahasa Inggris abad ke-19 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *TADWIN: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.19109/tadwin.v5i1.21606>
- Termorshuizen, G. (2001). *Journalisten en heethoofden: Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744–1905*. Nijgh & Van Ditmar; KITLV Uitgeverij.
- Universitas Gadjah Mada. (2024). *Bataviaasch Genootschap dan produksi pengetahuan kolonial* [Repositori tesis atau disertasi]. UGM Repository.
- Van Hogendorp, D. van. (1799). *Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indië en den handel op dezelve*. M. Roelofswaert.
- Wijayanti, A. (2018). Implementation of knowledge management (KM) on bound magazine service group at the National Library of Indonesia. In *Proceeding International Conference of Library, Archives, and Information Sciences (ICOLAIS)*.